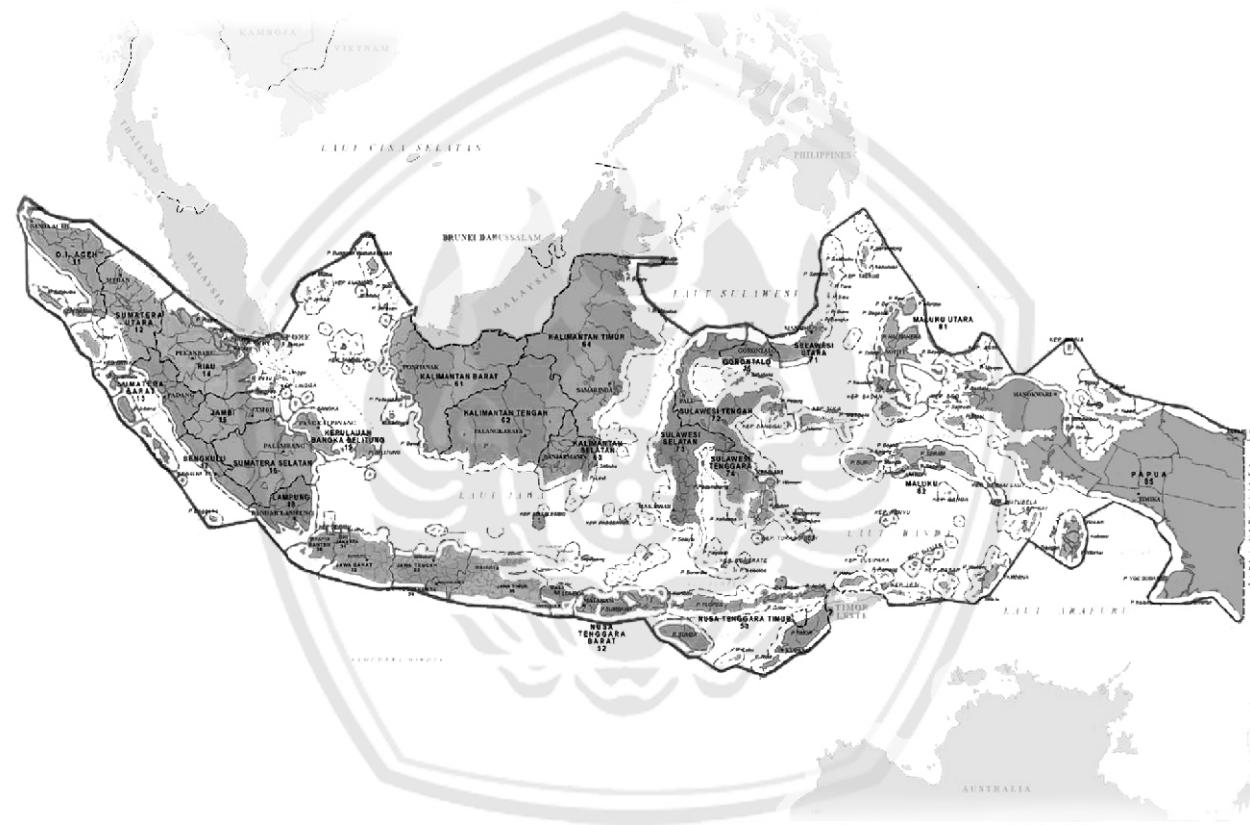


ISSN 2460-1543 e-ISSN 2442-9325

PADJADJARAN

Jurnal Ilmu Hukum

Journal of Law



Volume 1 Nomor Agustus 2014

2

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan

Dewi Kania Sugiharti¹⁶

Abstrak

Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN-PK BLU) merupakan instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan badan layanan umum, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan PTNPKBLU berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008, fleksibilitas tersebut hanya berlaku dalam pengelolaan keuangan. Tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan PTNPKBLU, wajib dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PTNPKBLU tersebut. Secara normatif, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada kuasa pengguna barang untuk memanfaatkannya untuk tujuan lain. Aturan memberi peluang untuk mendayagunakan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan, namun pemanfaatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pengelola barang, bukan oleh kuasa pengguna barang. Dalam hal ini, kuasa pengguna barang milik negara hanya berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya tersebut, kepada pengguna barang.

Kata Kunci: aset, bangunan, pengelolaan keuangan, perguruan tinggi negeri, tanah.

Optimization on Management and Utilization of State University's Land and Building Assets which Perform Financial Management in Order to Upgrade Education Service

Abstract

State University implementing PK BLU is a government agency with the right to use Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) to better increase educational service in order to improve the intellectual life of the people of Indonesia. Flexibility in a State

16 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, dewisyifa@yahoo.com, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).

Dewi Kania Sugiharti: Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pendidikan

University implementing PK BLU has to be based on economic principles, productivity, and fairness. Based on Government Regulation 23/2005 and Government Regulation 6/2006 amended by Government Regulation 38/2008, its flexibility applies only in financial management. Land and building in the possession of the State University PK BLU, are to be used in accordance with their designated tasks and functions. Normatively, there is no regulation that gives authority to the proxy of asset user to perform optimization beyond its designated purpose. Regulation gives opportunity to utilize state owned assets which are not used in accordance with the designated tasks and functions in forms lease, 'pinjam pakai', cooperative utilization, 'bangun serah guna'/'bangun guna serah' without ownership changing. However, the utilization could only be conducted by asset manager, not the proxy of asset user. The proxy asset user of state owned asset has only the right and responsibility to assign unused land and building for the interest of the asset users.

Keywords: asset, building, financial management, land, state university.

A. Pendahuluan

PK BLU didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.¹ PK BLU tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebagai prioritas utama, akan tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan.²

Pertumbuhan jumlah PK BLU di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan jumlah penetapan Satuan Kerja (Satker) yang bervariasi. Sampai dengan Mei 2013, terdapat 141 Satker yang telah ditetapkan untuk menerapkan PK BLU.³ Pada tahun 2005, terdapat 13 Satker yang ditetapkan menjadi PK BLU, 2006 sebanyak 4 Satker, 2007 sebanyak 20 Satker, 2008 sebanyak 16 Satker, 2009 sebanyak 28 Satker, 2010 sebanyak 24 Satker, 2011 sebanyak 21 Satker, dan tahun 2011 sebanyak 15 Satker.⁴ Ditinjau dari perspektif bidang layanan, pendidikan merupakan bidang layanan terbesar yang dilaksanakan oleh PK BLU. Berdasarkan laporan dari Direktorat

1 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang PK BLU).

2 Arifin P. Soeriaatmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 348.

3 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Satker yang Telah Ditetapkan untuk Menjadi PK BLU Per 27 Mei 2013", <http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/halaman/30/satker-blu>, diunduh pada 18 Oktober 2013.

4 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Data Satker BLU Berdasarkan Tahun Penetapan", <http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/news/graph>, diunduh pada 18 Oktober 2013.